Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



DILEMA URBAN : STUDI KESENJAGAN SOSIAL DAN AKSES LAYANAN PUBLIK PADA KOMUNITAS PEKERJA MIGRAN INFORMAL DI OESAPA, KECAMATAN KELAPA LIMA, KOTA KUPANG

Elisabeth Novrianti Mael[1], Mey Astri Monika Koli[2], Nurul Azizah Muslimin[3], George Yohanes Krisostomus Sasi[4], Marisa Wilmince Parera[5], Maria Nadia Sebhu[6], Lasarus Jehamat[7], Christine E. Meka[8], Lalu Didik Apriawan[9]

[1234567] Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana

ARTICLE INFO

Article history:
Received Januari, 2026
Revised Januari, 2026
Accepted Januari, 2026
Available Januari, 2026

nenimael559@gmail.com,
marisapareraatb@gmail.com,
sasigeorge579@gmail.com,
meykoly78@gmail.com,
marianadiasebhu@gmail.com,
nurullazizahh0813@gmail.com,
lasarusjehamat@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan sosial dan hambatan akses layanan publik yang dialami oleh komunitas pekerja migran informal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pekerja migran informal menggantungkan penghidupan pada sektor perdagangan di kawasan Pantai Oesapa sebagai strategi bertahan hidup akibat keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal. Kebijakan pemerintah yang tidak mengenakan pajak kepada pedagang memberikan ruang ekonomi bagi keberlangsungan usaha, namun tidak diiringi dengan perlindungan struktural yang memadai. Pekerja migran informal masih menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan publik, seperti air bersih, fasilitas kesehatan, dan program bantuan sosial, akibat tidak terdatanya mereka secara administratif. Penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja migran informal di wilayah perkotaan.

Kata kunci: pekerja migran informal, kesenjangan sosial, layanan publik, sektor informal, Kota Kupang

A B S T R A C T

This study aims to analyze social disparities and barriers to access public services experienced by informal migrant workers in Oesapa Subdistrict, Kelapa Lima District, Kupang City. The research employs a qualitative approach using in-depth interviews and field observations as data collection techniques. The findings indicate that most informal migrant workers rely on small-scale trading activities along Oesapa Beach as a survival strategy due to limited access to formal employment. The local government's policy of not imposing taxes on street vendors provides economic relief and supports business continuity; however, it is not accompanied by adequate structural protection. Informal migrant workers continue to face difficulties in accessing public services such as clean water, healthcare facilities, and social assistance programs due to their lack of official registration. This study highlights the need for more inclusive and responsive social protection policies to address the vulnerabilities of informal migrant workers in urban areas.

***Keywords**: informal migrant workers, social inequality, public services, informal sector, Kupang City*

1. PENDAHULUAN

Pekerja migran merupakan salah satu kelompok tenaga kerja yang memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian, baik bagi negara asal maupun negara tujuan. Melalui remitansi, pekerja migran turut menopang ekonomi keluarga dan berkontribusi pada pembangunan daerah. Namun demikian, di balik kontribusi tersebut, pekerja migran masih

*Corresponding author
E-mail addresses: nenimael559@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



menghadapi berbagai persoalan struktural, terutama terkait dengan kesenjangan kebijakan dan lemahnya perlindungan sosial. Kesenjangan dalam kebijakan perlindungan bagi pekerja migran hingga kini masih menjadi persoalan mendasar, khususnya bagi pekerja migran yang bekerja di sektor informal dan berada dalam kondisi rentan.

Berbagai regulasi nasional sebenarnya telah disusun untuk menjamin perlindungan pekerja, termasuk pekerja migran. Salah satu instrumen penting adalah Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap risiko kerja, kecelakaan, kematian, dan jaminan hari tua. Namun, dalam praktiknya, implementasi program tersebut belum sepenuhnya menjangkau pekerja migran, terutama mereka yang bekerja secara informal atau tidak tercatat secara administratif. Minimnya sosialisasi kebijakan, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta rendahnya pemahaman pekerja migran mengenai hak-hak normatif yang dimiliki menyebabkan perlindungan sosial yang seharusnya diterima tidak dapat diakses secara optimal. Akibatnya, banyak pekerja migran berada dalam kondisi rentan tanpa jaminan sosial yang memadai.

Dalam konteks migrasi internasional, isu perlindungan pekerja migran menjadi semakin kompleks karena mereka bekerja di luar wilayah yurisdiksi negara asal dan sering kali berada dalam posisi tawar yang lemah. Kondisi ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar pekerja migran terserap di sektor informal, yang umumnya tidak memiliki standar perlindungan kerja yang jelas. Suharto (dalam Rahmawati & Kamilah, 2020) menjelaskan bahwa perlindungan sosial mencakup seluruh tindakan pemerintah maupun pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, melindungi kelompok rentan, serta meningkatkan posisi sosial dan hak-hak kelompok terpinggirkan. Dengan demikian, pekerja migran informal seharusnya menjadi kelompok prioritas dalam skema perlindungan sosial karena tingkat kerentanannya yang tinggi.

Lebih lanjut, Hauff dan John (dalam Maryati, 2012) menegaskan bahwa negara merupakan aktor utama dalam penyelenggaraan perlindungan sosial, terutama melalui penyediaan skema jaminan sosial, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun asuransi sosial, serta kebijakan pasar kerja yang inklusif. Peran negara menjadi sangat krusial dalam memastikan bahwa pekerja migran memperoleh akses yang setara terhadap layanan publik, seperti kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Namun, dalam realitasnya, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang dirumuskan di tingkat nasional dengan implementasinya di tingkat lokal, khususnya di wilayah perkotaan yang menjadi tujuan atau titik transit pekerja migran.

Tujuan utama dari perlindungan sosial adalah mendorong proses pembangunan agar dapat berjalan secara ekonomi sekaligus diterima secara sosial dan politik, melalui upaya pencegahan serta pengurangan dampak negatif yang ditimbulkan oleh proses pembangunan itu sendiri (Habibullah et al., 2016). Dalam konteks pekerja migran, perlindungan sosial tidak hanya berfungsi sebagai jaring pengaman ketika terjadi risiko sosial, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas hidup, memperkuat integrasi sosial, dan mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat perkotaan.

Mobilitas tenaga kerja antarnegara bukanlah fenomena baru, terutama bagi negara-negara berkembang yang menghadapi keterbatasan lapangan pekerjaan di dalam negeri. Arus migrasi tenaga kerja internasional terus meningkat seiring dengan globalisasi ekonomi, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang memudahkan akses terhadap informasi peluang kerja di luar negeri. Di sisi lain, mobilitas ini juga memunculkan tantangan baru di daerah asal maupun daerah tujuan, termasuk persoalan akses terhadap layanan publik, integrasi sosial, dan pemenuhan hak-hak dasar pekerja migran dan keluarganya.

Dalam konteks lokal Kota Kupang, khususnya di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, komunitas pekerja migran informal menjadi kelompok sosial yang menarik untuk dikaji. Sebagai

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



kawasan urban, Oesapa menjadi ruang hidup bagi berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang sosial-ekonomi yang beragam, termasuk pekerja migran yang kembali atau sedang berada dalam fase transisi migrasi. Di tengah dinamika kehidupan perkotaan, pekerja migran informal sering kali menghadapi kesenjangan sosial serta hambatan dalam mengakses layanan publik, seperti layanan kesehatan, administrasi kependudukan, jaminan sosial, dan program bantuan pemerintah. Kesenjangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kebijakan, tetapi juga oleh faktor struktural, seperti status pekerjaan, tingkat pendidikan, jaringan sosial, dan stigma sosial terhadap pekerja migran.

Oleh karena itu, kajian mengenai kesenjangan sosial dan hambatan akses layanan publik yang dialami komunitas pekerja migran informal di Oesapa menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bentuk-bentuk kesenjangan yang dialami pekerja migran dalam konteks kehidupan urban, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya kesenjangan tersebut. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi perumusan kebijakan perlindungan sosial yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan pekerja migran, khususnya di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk kesenjangan sosial dan hambatan akses layanan publik yang dialami komunitas pekerja migran informal di Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi terjadinya kesenjangan tersebut dalam konteks kehidupan urban?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kesenjangan sosial dan hambatan akses layanan publik yang dialami komunitas pekerja migran informal di Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor sosial, ekonomi, dan struktural yang memengaruhi terjadinya kesenjangan tersebut dalam kehidupan masyarakat perkotaan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi penguatan kebijakan perlindungan sosial bagi pekerja migran.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, serta kondisi sosial yang dialami oleh komunitas pekerja migran informal, khususnya terkait dengan kesenjangan sosial dan akses terhadap layanan publik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada makna, proses, dan dinamika sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif, melainkan perlu dipahami melalui sudut pandang subjek penelitian dalam konteks kehidupan mereka sehari-hari.

Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial pekerja migran secara holistik dan kontekstual, dengan menempatkan pengalaman subjektif mereka sebagai sumber utama data. Melalui interaksi langsung dengan informan, peneliti dapat memahami bagaimana pekerja migran memaknai kebijakan perlindungan sosial, mengidentifikasi bentuk-bentuk kesenjangan yang mereka alami, serta mengungkap hambatan struktural dan sosial dalam mengakses layanan publik. Dengan demikian, pendekatan kualitatif dinilai relevan untuk mengungkap kompleksitas permasalahan pekerja migran dalam konteks kehidupan urban dan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kondisi sosial yang mereka hadapi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas pekerja migran informal yang bermukim dan beraktivitas di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, menggantungkan

*Corresponding author
E-mail addresses: nenimael559@gmail.com

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



sumber penghidupan mereka pada sektor perdagangan informal. Bentuk usaha yang paling dominan adalah berdagang makanan dan minuman di sepanjang kawasan Pantai Oesapa. Pilihan terhadap sektor ini bukan tanpa alasan, melainkan merupakan hasil dari keterbatasan akses pekerja migran terhadap lapangan pekerjaan formal. Rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan kerja yang terbatas, serta ketiadaan dokumen administratif yang memadai menjadi faktor utama yang menghambat mereka untuk masuk ke sektor formal. Dalam kondisi tersebut, perdagangan informal dipandang sebagai pilihan yang paling realistis dan mudah diakses untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Temuan ini menguatkan pandangan bahwa sektor informal berperan sebagai "katup pengaman" ekonomi bagi kelompok migran di wilayah perkotaan. Bagi pekerja migran informal di Oesapa, berdagang di kawasan pantai menjadi strategi adaptasi ekonomi untuk bertahan hidup di tengah tekanan biaya hidup perkotaan. Aktivitas ini tidak hanya menyediakan pendapatan, tetapi juga memberikan ruang bagi mereka untuk membangun jaringan sosial sesama pedagang dan masyarakat sekitar, yang secara tidak langsung berfungsi sebagai modal sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian menemukan bahwa pemerintah daerah tidak mengenakan pajak atau retribusi resmi kepada para pedagang kaki lima yang berjualan di kawasan Pantai Oesapa. Kebijakan ini dipahami sebagai bentuk toleransi dan upaya pemerintah untuk meringankan beban ekonomi masyarakat pesisir, khususnya pekerja migran informal yang masih berusaha menata kehidupan baru di Kota Kupang. Tidak adanya pungutan pajak memungkinkan para pedagang menjalankan usaha tanpa tekanan finansial tambahan, terutama mengingat penghasilan mereka yang tidak menentu.

Namun demikian, ketiadaan kewajiban pajak ini tidak serta-merta diikuti dengan adanya perlindungan atau dukungan struktural yang memadai. Para pedagang yang tidak tercatat secara resmi justru berada dalam posisi yang rentan karena tidak terintegrasi dalam sistem administrasi pemerintah. Akibatnya, mereka tidak memiliki akses terhadap fasilitas keamanan usaha, program bantuan sosial, jaminan sosial ketenagakerjaan, maupun program pemberdayaan ekonomi yang umumnya diperuntukkan bagi pelaku usaha formal. Kondisi ini menunjukkan adanya paradoks kebijakan, di mana pembebasan pajak memang meringankan beban ekonomi jangka pendek, tetapi pada saat yang sama memperlihatkan celah dalam sistem perlindungan dan pemberdayaan pekerja migran informal.

Kebijakan tidak memungut pajak ini, sebagaimana diungkapkan oleh informan, dirasakan cukup membantu keberlangsungan usaha mereka. Para pedagang menilai bahwa tanpa beban pajak, mereka dapat mengalokasikan seluruh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan memutar kembali modal usaha. Mengingat pendapatan harian yang tidak stabil, kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap ekonomi masyarakat kecil di kawasan pesisir. Secara umum, kebijakan ini memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan ekonomi jangka pendek pekerja migran informal.

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa pekerja migran informal masih menghadapi berbagai kesulitan dalam mengakses layanan publik. Salah satu informan, Mama Magdalena Angge, menuturkan bahwa keterbatasan akses terhadap air bersih, fasilitas kebersihan lingkungan, layanan kesehatan, serta program bantuan sosial menjadi persoalan yang dirasakan sehari-hari. Kondisi ini diperparah oleh fakta bahwa sebagian besar pedagang tinggal di kawasan pesisir Oesapa yang tergolong sebagai permukiman kumuh, dengan infrastruktur dasar yang minim dan lokasi yang relatif jauh dari pusat layanan publik. Selain itu, keterbatasan informasi dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan banyak pekerja migran tidak mengetahui hak-hak mereka sebagai warga kota maupun prosedur untuk mengakses layanan yang tersedia.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Status mereka sebagai pekerja migran informal yang tidak tercatat secara resmi juga menjadi penghambat utama dalam memperoleh jaminan sosial dan bantuan pemerintah. Ketidakjelasan status administratif membuat mereka berada di luar jangkauan berbagai program perlindungan sosial, meskipun secara ekonomi dan sosial mereka termasuk kelompok rentan. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara kebutuhan nyata pekerja migran informal dengan sistem pelayanan publik yang masih berbasis pada kategori formal dan administratif.

Lebih lanjut, informan lain menyampaikan harapan agar pemerintah lebih proaktif dalam menjawab permasalahan tersebut. Pemerintah dinilai perlu menyediakan fasilitas dasar langsung di lokasi usaha pedagang, seperti ketersediaan air bersih dan tempat pembuangan sampah, melakukan pendataan dan registrasi pedagang informal agar mereka dapat terdaftar secara resmi, serta memberikan sosialisasi dan pelatihan terkait hak-hak sosial dan akses layanan publik. Penataan ruang usaha yang aman dan tertib juga dipandang penting agar aktivitas perdagangan tidak mengganggu fasilitas umum sekaligus memberikan rasa aman bagi pedagang. Selain itu, pemantauan dan evaluasi rutin dari pemerintah diperlukan agar layanan publik dapat berjalan secara berkelanjutan dan tepat sasaran.

Dari aspek pendapatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penghasilan pedagang di kawasan Pantai Oesapa berkisar antara Rp100.000 hingga Rp300.000 per hari. Pada hari-hari biasa, pendapatan cenderung berada pada kisaran Rp100.000 karena jumlah pengunjung relatif sedikit. Penghasilan tersebut umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga tidak menyisakan ruang yang cukup untuk tabungan atau pengembangan usaha. Sebaliknya, pada akhir pekan atau hari libur, jumlah pengunjung meningkat secara signifikan, yang berdampak langsung pada meningkatnya aktivitas jual beli. Pada kondisi ini, para pedagang dapat memperoleh pendapatan hingga sekitar Rp300.000 per hari, yang sangat membantu dalam menutupi kebutuhan tambahan atau kekurangan pendapatan pada hari-hari sepi.

Perbedaan pendapatan antara hari biasa dan akhir pekan menunjukkan bahwa kondisi ekonomi pekerja migran informal sangat bergantung pada faktor eksternal, khususnya jumlah pengunjung pantai. Ketergantungan ini mencerminkan tingginya tingkat ketidakpastian pendapatan yang menjadi ciri khas sektor informal. Ketidakstabilan penghasilan tersebut menjadi tantangan utama bagi pekerja migran informal dalam menjaga keberlanjutan ekonomi rumah tangga dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang.

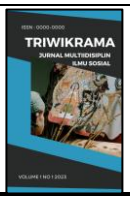
Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja migran informal di Kelurahan Oesapa berada dalam posisi yang ambigu antara toleransi kebijakan dan keterbatasan perlindungan sosial. Di satu sisi, kebijakan tidak memungut pajak memberikan ruang bagi mereka untuk bertahan secara ekonomi. Di sisi lain, ketiadaan pendataan dan perlindungan struktural menyebabkan mereka tetap berada dalam kondisi rentan dan sulit mengakses layanan publik. Temuan ini menegaskan pentingnya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif, yang tidak hanya berorientasi pada kelonggaran ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan kesejahteraan pekerja migran informal di wilayah perkotaan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pekerja migran informal di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, menggantungkan kehidupan ekonominya terutama pada sektor perdagangan informal, khususnya penjualan makanan dan

*Corresponding author
E-mail addresses: nenimael559@gmail.com



minuman di kawasan Pantai Oesapa. Pilihan terhadap sektor ini merupakan bentuk strategi bertahan hidup akibat keterbatasan akses terhadap pekerjaan formal yang disebabkan oleh rendahnya keterampilan, keterbatasan pendidikan, dan ketiadaan dokumen administratif. Sektor perdagangan informal menjadi ruang ekonomi yang paling memungkinkan bagi pekerja migran untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di tengah tekanan ekonomi perkotaan.

Kebijakan pemerintah daerah yang tidak mengenakan pajak atau retribusi kepada pedagang kaki lima di kawasan pantai memberikan dampak positif bagi keberlangsungan usaha pekerja migran informal. Kebijakan ini meringankan beban ekonomi dan memungkinkan pedagang mempertahankan usaha meskipun pendapatan mereka tidak stabil. Namun, ketiadaan pungutan pajak tersebut tidak diiringi dengan sistem perlindungan dan pemberdayaan yang memadai. Para pedagang tetap berada dalam kondisi rentan karena tidak terdata secara resmi, sehingga mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, jaminan sosial, bantuan pemerintah, serta fasilitas dasar seperti air bersih dan kebersihan lingkungan.

Selain itu, tingkat pendapatan pekerja migran informal yang sangat bergantung pada jumlah pengunjung pantai menunjukkan tingginya ketidakpastian ekonomi yang mereka hadapi. Fluktuasi pendapatan antara hari biasa dan akhir pekan menegaskan bahwa kehidupan ekonomi mereka belum berkelanjutan dan masih berada pada level subsistensi. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan sosial dan hambatan struktural dalam akses layanan publik yang memperkuat posisi marjinal pekerja migran informal di ruang urban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah meningkatkan peran aktif dalam memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi pekerja migran informal di Kelurahan Oesapa. Pemerintah perlu melakukan pendataan dan registrasi pedagang informal secara inklusif tanpa memberatkan, sehingga mereka dapat terintegrasi dalam sistem layanan publik dan memperoleh akses terhadap program bantuan sosial serta jaminan sosial ketenagakerjaan.

Selain itu, penyediaan fasilitas dasar di kawasan pantai, seperti akses air bersih, tempat pembuangan sampah, dan sarana kebersihan lingkungan, perlu menjadi prioritas guna mendukung keberlanjutan usaha dan kualitas hidup pedagang. Pemerintah juga disarankan untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan secara berkala terkait hak-hak pekerja migran, prosedur akses layanan publik, serta pelatihan keterampilan usaha guna meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut dampak jangka panjang kebijakan pengelolaan sektor informal terhadap kesejahteraan pekerja migran, serta mengeksplorasi model perlindungan sosial yang lebih adaptif dan kontekstual bagi pekerja migran informal di wilayah perkotaan. Dengan demikian, diharapkan tercipta kebijakan yang tidak hanya memberikan toleransi ekonomi, tetapi juga menjamin keadilan sosial dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik. (2022). *Statistik migrasi dan pekerjaan informal di Indonesia*. BPS.

BPS Kota Kupang. (2021). *Profil Kelurahan Oesapa*. BPS Kota Kupang.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Habibullah, Irmayani, N., & Rahman, A. (2016). Perlindungan sosial dalam mendukung proses pembangunan. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 11, Number 10, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



Maryati. (2012). Peran negara dalam penyelenggaraan perlindungan sosial. *Jurnal Kesejahteraan Sosial*.

Putri, R., & Santoso, H. (2020). Kesenjangan sosial dan akses layanan publik di kawasan perkotaan: Studi kasus pedagang kaki lima. *Jurnal Sosiologi Urban, 12*(2), 45–58.

Rahmadhani, S., Fauzi, R. M., & Nulhaqim, S. A. (2022). Peran pekerja sosial dalam perlindungan bagi pekerja migran. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (JPPM), 3*(2), 87–95.

Rahmawati, & Kamilah. (2020). *Perlindungan sosial bagi kelompok rentan dalam perspektif kebijakan sosial*.

Suharto, E. (2009). *Kemiskinan dan perlindungan sosial di Indonesia: Menggagas model jaminan sosial universal bidang kesehatan*. Alfabeta.

Sutrisno, A. (2019). *Migrasi pekerja informal dan strategi bertahan hidup di kota besar*. Pustaka Pelajar.

Tim Nasional Pekerja Migran Indonesia. (2021). *Laporan kondisi pekerja migran di sektor informal*. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

*Corresponding author
E-mail addresses: nenimael559@gmail.com